KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL

1721-B1

KEMENTERIAN KEUANGAN RI	0 0 0 0 4 2 7		H.4 X	H.4 X Final		
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	H.2 X Pembetulan Ke-	0 H.3 Pembatala	n	н.5	Tidak Final	
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG						
A.1 NPWP : 82 748 900 6 722 000						
A.2 NIK :						
A.3 Nama : AHMAD SYARIF						
B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG						
MASA PAJAK (mm-yyyy)	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)	
B.1 B.2	B.3	B.4	B.5	B.6	B.7	
2 21-402-01	1.249.961	1.249.961	0	5	62.498	
Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota B.8 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen Nama Dokumen Nama Dokumen Nama Dokumen Nomor : Tanggal Nomor : Nom						
C.1 NPWP Instansi Pemerintah : C.2 Nama Instansi Pemerintah : C.3 ID Subunit Organisasi : C.4 Tanggal : C.5 Nama Penandatangan :	RUMAH SAKIT JIWA DAEF 2 3 dd 0 2 mm HARI JUMADI	1 6 2 7 2 2 RAH ATMA HUSADA MAHAK 2 0 2 2 yyyy	OOO	ALIMANTAN	I TIMUR	
C.6 Pernyataan Wajib Pajak :		ahwa bukti Pemotongan/Pemungut	tan Unifikasi telah sa	ya isi dengan	benar dan telah saya	
Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan.						

FMOA04ZT